

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

2.1.1 Pengertian Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Hartadi (2012), teori agensi menghubungkan permasalahan konflik kepentingan yang muncul dari adanya hubungan kontraktual dari pihak *principal* dan *agent* yang mana kedua pihak tersebut memiliki informasi yang berbeda. Perbedaan informasi ini menimbulkan asimetri informasi yang menyebabkan perbedaan kepentingan.

Teori ini menyebutkan adanya hubungan antara pemilik dan manajemen. Dalam hal ini *principal* (pemilik) dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau investor yang memberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan operasional perusahaan kepada *agent* (manajemen). *Agent* (manajemen) adalah pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab oleh pemilik untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh laba.

Teori keagenan juga dijelaskan oleh Sari dan Sudana (2013) yang mengatakan bahwa teori keagenan dalam audit berkaitan dengan auditor sebagai pihak ketiga yang akan membantu untuk mengatasi konflik kepentingan yang dapat terjadi antara *principal* dan *agent*. *Principal* sebagai pemilik maupun investor bekerja sama dan mendatangi kontrak kerja dengan *agent* sebagai manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka.

Hal ini menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Menurut Hanifah (2015) Konflik ini bermula ketika pemilik memiliki perjanjian untuk memberikan kompensasi tinggi kepada manajemen jika perusahaan memperoleh laba yang tinggi. Sedangkan manajemen memiliki perjanjian kepada pemilik untuk menjalankan kewajibannya terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka citra perusahaan di mata masyarakat terutama bagi pemegang saham akan semakin bagus. Dengan demikian permasalahan utama antara *principal* dan *agent* terletak pada tingkat perolehan laba.

Hal tersebut menimbulkan benturan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Benturan kepentingan ini menciptakan konflik kepentingan bagi kedua belah pihak. Pihak *agent* tentunya memiliki informasi yang lebih terkait dengan kondisi dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan informasi yang dimiliki *principal*. Keadaan ini menyebabkan asimetri informasi diantara *principal* dan *agent*. Timbulnya keinginan *agent* untuk memperoleh laba yang tinggi agar mendapatkan kompensasi yang tinggi pula, menyebabkan *agent* menghalalkan segala cara agar perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. Motivasi inilah yang menyebabkan *agent* bisa melakukan tindakan kecurangan pada laporan keuangannya (Fatimah, 2016)

2.1.2 Dampak Teori Agensi (*Agency Theory*)

Sebagai dampak dari teori agensi, maka diperlukan pihak ketiga yang disebut sebagai auditor independen dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Adanya auditor yang independen untuk melakukan pengujian maupun

pemeriksaan diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Selain itu, auditor independen dapat mengevaluasi kinerja manajemen sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna bagi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan rasional untuk investasi (Sari dan Sudana, 2013)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak ketiga yang independen, auditor seringkali mengalami suatu konflik kepentingan dengan manajemen. Hal tersebut terjadi pada suatu situasi dimana auditor yang dipercaya memiliki kepentingan profesional melakukan auditing sesuai dengan standar audit, kode etik, dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan memiliki kepentingan pribadi dimana auditor bergantung pada manajemen yang membayar jasa auditnya. Kepentingan yang bersaing tersebut dapat mempersulit auditor untuk tidak memihak sehingga auditor berpotensi akan kehilangan independensinya (Gavious, 2007)

2.2 Auditing

2.2.1 Pengertian Auditing

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, auditing berasal dari kata dasar audit yang artinya dibagi menjadi dua. Pertama adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala dan kedua adalah pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan. Pengertian audit menurut Mulyadi (2002:9) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Arens *et al* (2008:4) juga mendefinisikan audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa auditing merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti atau asersi secara sistematis pada laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan hasil dari audit tersebut dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

2.2.2 Standar Auditing

Arens *et al* (2008:42) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Secara kolektif, Standar Audit menyediakan standar bagi pekerjaan auditor dalam memenuhi tujuan keseluruhan auditor. Standar Audit mengatur tanggung jawab umum auditor, dan pertimbangan lebih lanjut auditor yang berkaitan dengan penerapan tanggung jawab tersebut dalam hal-hal tertentu (Standar Auditor, 2013:200.21). Standar Audit juga berisi tujuan, ketentuan, serta materi penerapan dan penjelasan lain yang dirancang untuk mendukung auditor dalam memperoleh keyakinan yang memadai (Standar Audit, 2013:200.5).

Saat ini, Standar Audit yang berlaku di Indonesia telah berubah dan diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) terbaru tahun 2013 yang dibagi menjadi 6 kategori, yaitu:

1. Prinsip Umum dan Tanggung Jawab

- a) SA 200: Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit
- b) SA 210: Persetujuan atas ketentuan perikatan audit
- c) SA 220: Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan
- d) SA 230: Dokumentasi audit
- e) SA 240: Tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan
- f) SA 250: Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan
- g) SA 260: Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
- h) SA 265: Pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen

2. Penilaian Risiko dan Respon Terhadap Risiko yang Dinilai

- a) SA 300: Perencanaan suatu audit
- b) SA 315: Pengindentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungan

- c) SA 320: Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit
- d) SA 330: Respon audit terhadap risiko yang telah dinilai
- e) SA 420: Pertimbangan terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa
- f) SA 450: Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit

3. Bukti Audit

- a) SA 500: Bukti audit
- b) SA 501: Bukti audit: pertimbangan spesifik atas unsur pilihan
- c) SA 505: Konfirmasi eksternal
- d) SA 510: Perikatan audit tahun pertama
- e) SA 520: Prosedur analitis
- f) SA 530: Sampling audit
- g) SA 540: Audit atas estimasi akuntansi termasuk nilai wajar dan pengungkapan
- h) SA 550: Pihak berelasi
- i) SA 560: Peristiwa kemudian
- j) SA 570: Kelangsungan usaha
- k) SA 580: Representasi tertulis

4. Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain

- a) SA 600: Perimbangan khusus-audit atas laporan keuangan grup
- b) SA 610: Penggunaan pekerjaan auditor internal
- c) SA 620: Penggunaan pekerjaan pakar auditor

5. Kesimpulan Audit dan Pelaporan

- a) SA 700: Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan
- b) SA 705: Modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen
- c) SA 706: Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan audit

6. Area Khusus

- a) SA 800: Pertimbangan khusus-audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai kerangka bertujuan khusus
- b) SA 805: Pertimbangan khusus-audit atas laporan keuangan tunggal dan suatu unsur, akun, atau pos tertentu dalam laporan keuangan
- c) SA 810: Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan.

Tujuan dari Standar Audit sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik yang berlaku saat ini (Standar Audit, 2013:200.5) adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan berdasarkan

suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas;

2. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material, melalui perancangan dan penerapan respon yang tepat terhadap risiko yang dinilai; dan
3. Untuk dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh.

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Auditing

Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dapat dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Standar Audit, 2013:200.4). Audit dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) mengenai apakah terdapat masalah salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*errors*) maupun kecurangan (*fraud*) (Standar Audit, 2013:200.5). Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Anggriawan (2014) yang mengatakan bahwa dengan dilakukannya audit khususnya oleh auditor eksternal adalah dapat memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan apakah laporan keuangan telah disusun dengan standar yang berlaku serta mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas suatu entitas bisnis. Hal tersebut juga dapat memastikan apakah laporan keuangan tersebut ada atau tidaknya salah saji yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan.

2.3 Kecurangan

2.3.1 Definisi Kecurangan

Definisi kecurangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata curang yang artinya tidak jujur, tidak adil, sedangkan kecurangan bermakna perbuatan untuk tidak jujur, tidak adil. Kekeliruan berasal dari kata keliru, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya salah, tertukar, sedangkan kekeliruan adalah tindakan kesalahan, tidak sengaja. Tuanakotta (2013) mendefinisikan kecurangan sebagai suatu tindakan melawan hukum yang memiliki unsur kesengajaan, penipuan, niat jahat, menyembunyikan dan penyalahgunaan kepercayaan.

Standar Audit (2013:240.5) menjelaskan mengenai dua tipe kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang dapat ditemukan oleh auditor yaitu tipe kesalahan yang disebabkan oleh adanya kecurangan dan tipe kesalahan yang disebabkan oleh adanya kekeliruan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah termasuk tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang dapat mengakibatkan terjadinya salah saji (*misstatement*) dalam laporan keuangan. Jika tindakan yang menyebabkan salah saji tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut kecurangan. Sedangkan, tindakan yang dilakukan secara tidak disengaja disebut sebagai kekeliruan.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan kecurangan dan kekeliruan terletak pada tindakan yang mendasarinya. Tindakan tersebut apakah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tindakan kecurangan

dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan kekeliruan tidak didasarkan motivasi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2.3.2 Klasifikasi Kecurangan.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) pada tahun 2005 mengategorikan kecurangan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*)

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset terbagi dalam dua kategori, yaitu penyalahgunaan kas yang dapat dilakukan dengan *skimming*, *larceny* atau *fraudulent disbursement*, dan penyalahgunaan non kas yang dapat dilakukan dengan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang

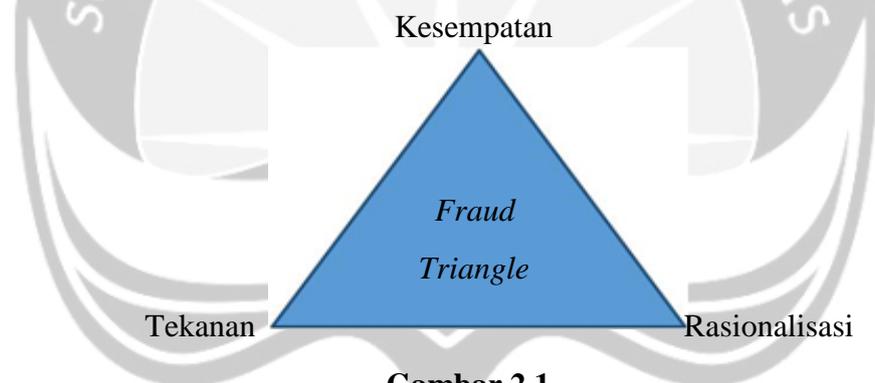
3. Laporan Keuangan yang dimanipulasi (*Fraudulent Statements*)

Kecurangan ini didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Laporan keuangan yang dimanipulasi dapat dilakukan dalam hal *financial* maupun *non-financial*. Pada bagian finansial, laporan keuangan yang dimanipulasi dapat dilakukan dengan *asset / revenue understatement* dan *asset / revenue overstatement*.

Pada bagian non-finansial dapat dilakukan dengan *employment credentials*. Contoh dari kecurangan ini adalah mencatat pendapatan fiktif, mencatat pendapatan atau beban dalam periode yang tidak sesuai atau tidak tepat, menyembunyikan kewajiban dan beban agar perusahaan seolah-olah terlihat baik dan menyembunyikan atau menghilangkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan secara sengaja.

2.3.3 Penyebab Kecurangan

Menurut Tuanakotta (2013:47-51) menjelaskan mengenai tiga unsur pendorong tindakan kecurangan yang dikenal sebagai Segitiga kecurangan (*fraud triangle*) sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Segitiga Kecurangan.

1. *Opportunity* (kesempatan)

Untuk melakukan kecurangan, seseorang membutuhkan kesempatan. Hal ini diakibatkan karena seseorang mempercayai bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak terdeteksi oleh pihak lain. Peluang tersebut dapat terjadi ketika sistem pengendalian dalam suatu perusahaan lemah, kurangnya pengawasan dari manajemen maupun prosedur yang tidak memadai. Umumnya, manajemen suatu perusahaan mempunyai

kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.

2. *Pressure* (tekanan)

Menurut Sukiman (2013) unsur tekanan dapat berupa tekanan finansial dan *non* finansial. Tekanan finansial muncul ketika seseorang memiliki keinginan untuk mempunyai gaya hidup berkecukupan atau memuaskan diri secara materi. Sedangkan tekanan *non* finansial adalah sifat seseorang yang serakah atau tindakan ingin menyembunyikan kinerja yang buruk

3. *Rationalization* (rasionalisasi)

Rasionalisasi atau pembembenaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mencari berbagai alasan rasional atas tindakan yang telah dilakukannya. Hal tersebut terjadi apabila seseorang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Misalnya adalah ketika perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak masalah jika pelaku mengambil bagian dari keuntungan tersebut.

2.3.4 Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit, bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan (Standar Audit, 2013:240.5). Berdasarkan hal tersebut, maka auditor diharuskan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Kemampuan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia

berasal dari kata mampu yang artinya kapasitas seorang individu untuk sanggup melakukan tugas dalam pekerjaan. Maka, dapat disimpulkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kapasitas seorang auditor untuk mampu mendeteksi adanya tindakan yang tidak jujur pada laporan keuangan. Auditor diharuskan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab seorang auditor. Jika dalam proses pengauditan auditor menemukan adanya indikasi kecurangan, maka auditor bertanggung jawab mengkomunikasikan dengan segera hal tersebut kepada tingkat manajemen yang tepat, dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan tentang hal-hal yang relevan dengan tanggung jawab mereka (Standar Audit, 2013:240.1-14).

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh auditor yang berguna dalam menemukan bentuk-bentuk kecurangan pada laporan keuangan yang diaudit. Kemampuan mendeteksi kecurangan juga menjadi tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang berlaku.

Tetapi pada praktiknya, tidak semua auditor dapat mendeteksi dan menemukan kecurangan. Berdasarkan penelitian Koroy (2008) disimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan diantaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman mengenai bentuk dan karakteristik kecurangan

Memiliki pemahaman mengenai bentuk dan karakteristik kecurangan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor untuk memaksimalkan pendeteksian kecurangan. Standar Audit menjelaskan bahwa auditor harus meminta keterangan dari pihak entitas mengenai berbagai tindak kecurangan yang dapat terjadi (Standar Audit, 2013:240.8) Namun, memiliki pemahaman tersebut bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Melalui berbagai penugasan yang telah dilakukan, auditor dapat memahami berbagai modus, tindakan dan teknik-teknik yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kecurangan tersebut serta paham mana saja pihak-pihak yang dapat sengaja melakukan kecurangan pada perusahaan

2. Kurangnya pemahaman Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Standar Audit, 2013:315.5). Ketika dalam melakukan penugasan, memahami struktur Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan awal yang dapat dilakukan untuk melihat apakah terdapat celah pada sistem yang berakibat pada tindakan kecurangan. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dapat

berupa kondisi mental dan pengawasan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tidak maksimal

3. Lingkungan pekerjaan audit

Lingkungan pekerjaan audit yang buruk dapat mengurangi kualitas dalam mendeteksi kecurangan. Tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan pekerjaan dapat berupa tekanan kompetensi atas *fee*, waktu, dan relasi antara auditor dengan *auditee*. Tekanan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak memberikan dampak buruk pada kualitas audit dalam mendeteksi kecurangan (Koroy, 2008)

4. Metode dan prosedur audit yang digunakan

Ketika Auditor dalam penugasan, auditor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun metode dan prosedur audit. Prosedur audit dan metode yang efektif dapat membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan baik. Prosedur audit untuk mendeteksi kecurangan yang diatur dalam Standar Audit 315 tahun 2013 adalah prosedur penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material apakah karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi (Standar Audit, 2013:315.4). Selain itu, dengan mengetahui riwayat entitas apakah dahulu pernah melakukan tindakan kecurangan atau tidak,

merupakan prosedur audit yang dapat membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan salah satu metode audit menurut Fatimah (2016) adalah mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi. Memahami faktor-faktor penyebab kecurangan juga merupakan metode audit yang dapat membantu auditor dalam mendeteksi tindak kecurangan

Seorang auditor dapat gagal dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi atau bahkan setelah mengetahui adanya kecurangan tersebut, dikarenakan auditor yang bertugas ikut terlibat dalam menyembunyikan kecurangan tersebut. Oleh sebab itu, auditor memerlukan sikap yang harus dipertahankan sesuai dengan standar umum profesinya, yaitu sikap kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional (IAPI, 2013 dan 2016).

2.4 Kompetensi Auditor

2.4.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor adalah kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan dan keahliannya untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam satu tim maupun secara mandiri sesuai dengan standar audit, kode etik, dan ketentuan hukum (IAPI, 2016). Menurut Hartan (2016) kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang diperlukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit secara benar.

Menurut Sari dan Sudana (2013) kompetensi auditor adalah kemampuan profesional auditor dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam

melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pelatihan, seminar, maupun symposium.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan profesional individu dalam menerapkan mutu profesional, pengetahuan umum dan keahlian khusus yang dimiliki oleh auditor.

2.4.2 Manfaat Kompetensi Auditor

Kompetensi bagi auditor memberikan manfaat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Memiliki kompetensi yang cukup, auditor dapat mengasah sensitivitasnya dalam menganalisis laporan keuangan yang diaudit apakah di dalam laporan keuangan tersebut terdapat tindakan kecurangan atau tidak (Widisyastuti dan Pamudji, 2009). Arens *et al* (2012) juga menjelaskan mengenai kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan”

Sikap kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan tersebut.

2.4.3 Indikator Kompetensi

Kompetensi auditor adalah kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara

bersama-sama dalam satu tim maupun secara mandiri sesuai dengan standar profesional akuntan publik, kode etik, dan ketentuan hukum (IAPI, 2016). Suraida (2005) menyatakan bahwa kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, yang dapat diukur dengan indikator mutu profesional, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Pengertian tersebut dapat menjadi indikator pengukur dalam variabel kompetensi auditor. Suraida (2005) dan Putra (2012) menjabarkan ketiga hal tersebut sebagai berikut:

1. Mutu Personal

Saat menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti befikiran terbuka, befikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerja sama dalam tim, memiliki rasa ingin tahu, memiliki kualifikasi personel yang diharapkan, mampu mengaudit dengan tepat, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik

2. Pengetahuan Umum

Pengetahuan umum dapat berupa pemahaman mengenai standar yang berlaku dan *review* analisis. Selain itu, auditor perlu memahami mengenai pengetahuan yang diperoleh saat menjalani pendidikan sebagai mahasiswa maupun saat menjadi auditor

3. Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang dimiliki oleh auditor antara lain, mampu mempresentasikan laporan dengan baik, memiliki sertifikat pelatihan dalam bidang akuntansi seperti perpajakan, sistem informasi, dan

perencanaan keuangan, dan dapat mengimplemantasikan ilmu yang berasal dari sertifikasi tersebut

2.5 Pengalaman Auditor

2.5.1 Pengertian Pengalaman Auditor

Selain kompetensi, untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan sebagai bagian dari tugas auditnya, maka dibutuhkanlah pengalaman. Pengalaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang pernah dialami, dirasakan, dan ditanggung oleh seseorang. Pratiwi dan Indira (2013) menyatakan bahwa pengalaman audit merupakan pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi banyaknya penugasan yang pernah ditangani maupun lamanya waktu auditor menggeluti profesinya. Dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor, tidak hanya membuat auditor memiliki kemampuan dalam menemukan kecurangan atau kekeliruan dalam laporan keuangan, tetapi juga dapat memberikan penjelasan terhadap temuannya dibandingkan auditor yang hanya memiliki sedikit pengalaman (Nasution, 2012).

Mulyadi (2002) juga menjelaskan bahwa seorang auditor harus memiliki pengalaman dan pendidikan formal dalam kegiatan auditnya. Pengalaman dan pendidikan formal dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling melengkapi. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja auditor adalah suatu proses pembelajaran serta perkembangan potensi auditor berdasarkan peristiwa yang telah dilaluinya yang dapat diukur berdasarkan lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya jumlah tugas yang telah dilaksanakan.

2.5.2 Manfaat Pengalaman Auditor

Biksa dan Wiratmaja (2016) mengatakan pengalaman yang dimiliki oleh auditor akan membantunya dalam meningkatkan keahliannya. Auditor dengan tingkat pengalaman yang tinggi akan lebih mudah menemukan adanya kecurangan, dikarenakan mereka telah melaksanakan berbagai macam tugas dan kasus audit dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman.

Pengalaman merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman akan memberikan pembelajaran terhadap berbagai jenis kecurangan yang pernah ditemukan oleh auditor (Anggriwan, 2014). Purnamasari (2005) menyatakan bahwa pengalaman yang tinggi akan memberikan keunggulan, seperti:

1. Mampu mendeteksi salah saji atau kesalahan;
2. Memahami kesalahan; dan
3. Mencari penyebab timbulnya kesalahan tersebut

Pengalaman memberikan keunggulan bagi auditor untuk dapat berfikir lebih kritis dan lebih terstruktur terhadap permasalahan atau temuan dalam melaksanakan tugas.

2.5.3 Indikator Pengalaman Auditor

Bedasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian pengalaman adalah suatu hal yang pernah dijalani, dirasakan, dan ditanggung oleh seseorang. Pengalaman auditor menurut Asih (2006)

dan Kusuma (2012:21), adalah pengalaman melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani.

Pernyataan di atas berkaitan dengan pengertian pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata dijalani merujuk kepada lama waktu bekerja sebagai auditor, kata dirasai merujuk kepada berbagai jenis perusahaan yang pernah diaudit oleh auditor, dan ditanggung merujuk kepada banyaknya tugas pemeriksaan atau penugasan yang dilakukan oleh auditor. Oleh sebab itu, pengertian pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pernyataan Asih (2006) dan Kusuma (2012) dapat menjadi indikator pengalaman auditor.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang akuntan beregister bab dua bagian kesatu pasal 3-5 mengatakan bahwa:

1. Syarat untuk sebagai akuntan beregister adalah berpengalaman praktik dibidang akuntansi paling sedikit 3 tahun
2. Berpengalaman praktik dibidang akuntansi juga dapat diperoleh dengan :
 - a) menjadi pengajar bidang akuntansi paling sedikit 3 tahun, yang disetarakan dengan pengalaman praktik dibidang akuntansi selama 2 tahun
 - b) Menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, pendidikan magister, atau pendidikan doktor di bidang akuntansi, yang disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi selama satu 1 tahun

Pengalaman auditor sejak dari awal telah diwajibkan dan dipandang sebagai bagian penting dalam kinerja auditor, terutama kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga pengalaman dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017) tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik, yang mengatakan bahwa:

1. Untuk dapat memperoleh izin akuntan publik, harus menyertakan surat pengalaman memberikan jasa audit paling sedikit 1000 jam jasa audit atas informasi keuangan historis dalam 7 tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 jam diantaranya memimpin dan/atau menyupervisi perikatan audit atas informasi keuangan historis
2. Untuk provinsi yang tidak terdapat KAP atau cabang KAP, untuk dapat memperoleh izin akuntan publik, harus menyertakan surat pengalaman memberikan jasa audit paling sedikit 500 jam jasa audit atas informasi keuangan historis dalam tujuh 7 tahun terakhir

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang auditor, sudah harus memiliki pengalaman dibidang akuntansi minimal selama 3 tahun dan sekurang-kurangnya 500 jam kerja.

2.6 Independensi Auditor

2.6.1 Pengertian Independensi Auditor

Selain sikap kompetensi dan pengalaman auditor, sikap penting lainnya yang harus dimiliki oleh auditor adalah independensi. Definisi independensi

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata independen yang artinya adalah berdiri sendiri, berjiwa bebas, dan tidak terikat. Menurut Arens *et al* (2012:35) sikap independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2019:290.4) mengatakan bahwa dalam perikatan audit, mewajibkan setiap akuntan publik dan personel dalam tim, kantor dan jaringan kantor harus independen terhadap klien audit. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2019:290.6) menyatakan bahwa independensi terbagi menjadi independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan.

Independensi menurut Mulyadi (2008:26) adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak bergantung orang lain. Independensi bisa dikatakan kejujuran seorang auditor ketika mempertimbangkan fakta dan memberikan opininya. Independensi juga dapat dikatakan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif yaitu tidak memihak kepada pihak lain ketika merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan definisi dari independensi adalah sikap mental yang tidak memihak, tidak dikendalikan, serta bebas dari pengaruh pihak lain dalam melakukan audit laporan keuangan.

2.6.2 Manfaat Independensi Auditor

Sikap independensi diperlukan auditor agar bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun sehingga auditor dapat mendeteksi adanya kecurangan

dengan tepat dan setelah kecurangan tersebut dideteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangannya (Widiyastuti dan Pamudji, 2009).

Sikap independensi berguna agar keputusan auditor tidak akan memihak pada salah satu pihak yang berkepentingan, begitu juga apabila auditor menemukan adanya kecurangan, walaupun merugikan salah satu pihak terkait. Dengan memiliki sikap independen, auditor akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit akan dipandang tidak memihak atau menyimpang.

2.6.3 Indikator Independensi Auditor

Agoes (2012:34-35) membagi independensi ke dalam tiga indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Independensi dalam fakta

Independensi dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti auditor harus memiliki sikap berdiri sendiri seperti kejujuran dalam mempertimbangkan fakta yang ditemuinya agar dapat mempertahankan sikap tidak bias dalam auditnya, bebas dalam menjalankan penugasan audit tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, serta mampu melaksanakan tanggung jawab dalam penugasan audit.

2. Independensi dalam penampilan

Independensi dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya atau bisa dikatakan

melihat hubungan keterikatan auditor dengan kliennya secara personal maupun keseluruhan. Contohnya adalah ketika seorang auditor yang mengaudit laporan keuangan milik perusahaan rekan atau keluarganya, dalam diri auditor tersebut mampu bersikap secara indenpenden. Namun, jika dilihat dari sudut pandang pihak lain dalam hal ini pemakai laporan keuangan yang mengetahui fakta bahwa terdapat hubungan keluarga atau rekan antara auditor dengan pemimpin perusahaan tersebut, maka independensi auditor tersebut akan diragukan

3. Independensi dalam pemikiran.

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara obyektif.

2.7 Skeptisisme Profesional Auditor

2.7.1 Pengertian Skeptisisme Profesional Auditor

Auditor dalam menjalankan penugasan seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur audit yang ada, namun harus disertai dengan sikap skeptisisme profesionalnya. Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu fikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit

(Standar Audit, 2013:200.8). Tuanakotta (2013) juga mendefinisikan skeptisisme profesional merupakan sikap atau perilaku dengan pertanyaan di dalam pikiran, waspada terhadap keadaan yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah saji baik karena kesalahan atau kecurangan, dan penilaian kritis atas asersi atau bukti audit.

Menurut Adyani dkk (2014) skeptisisme profesional adalah sikap tidak mudah percaya akan bukti audit yang disajikan oleh manajemen, sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi atas bukti audit secara kritis. Anggriawan (2014) juga menyimpulkan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti audit yang diperoleh, sehingga dalam melaksanakan penugasan seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti audit yang telah diperolehnya dan mempertimbangkan kecukupan bukti yang diperoleh.

Berdasarkan definisi dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan, sikap tidak mudah percaya, dan memberikan penilaian kritis terhadap bukti audit yang ditemukan.

2.7.2 Manfaat Sikap Skeptisisme Profesional

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung salah saji material (Standar Audit, 2013:200.9) Adyani dkk (2014) menyatakan bahwa skeptisisme profesional sangat penting guna memberikan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit

yang relevan untuk dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan.

Haura (2016) mengatakan bahwa dengan memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi, auditor akan mengembangkan pencarian informasi tambahan bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan. Skeptisisme profesional dapat membantu auditor dalam mengumpulkan informasi yang kuat sebagai dasar bukti audit untuk mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan (Fatimah, 2016). Dengan memiliki sikap skeptis yang tinggi, memungkinkan seorang auditor untuk mendeteksi kecurangan yang lebih baik (Anggriawan, 2014).

Menurut Standar Audit (2013:200.14), dengan mempertahankan sikap skeptisisme profesional selama audit, auditor dapat mengurangi risiko, seperti :

1. Kegagalan dalam melihat kondisi -kondisi tidak lazim;
2. Terlalu meyamarkan kesimpulan ketika menarik kesimpulan tersebut dari observasi audit; dan
3. Menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menetapkan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta penilaian atas hasilnya.

2.7.3 Indikator Sikap Skeptisisme Profesional

Menurut Hurtt *et al* (2010) sikap skeptisisme profesional dibentuk oleh beberapa indikator, seperti:

1. *Questioning Mind.*

Adalah karakter skeptis seseorang untuk selalu mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian akan sesuatu. Karakteristik skeptis ini bentuk dari beberapa indikator:

- a) Menolak suatu pernyataan atau *statement* tanpa pembuktian yang jelas
- b) Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal

2. *Suspension on Judgment*

Adalah karakter yang menyatakan bahwa untuk membuat pertimbangan yang matang, seseorang membutuhkan. Karakteristik ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Membuat keputusan matang membutuhkan waktu
- b) Dalam mencari informasi yang dibutuhkan memerlukan waktu

3. *Search of Knowledge*

Adalah karakter skeptis seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Karakter ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Berusaha untuk menemukan dan mencari informasi baru
- b) Menikmati proses pembelajaran untuk menemukan hal baru

4. *Interpersonal Understanding*

Adalah karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integrasi dari penyedia informasi. Karakter ini dibentuk dari indikator:

- a) Berusaha memahami perilaku orang lain
- b) Berusaha memahami makna yang tersirat yang disampaikan maupun ditampilkan oleh orang lain

5. *Self Confidence*

Adalah karakter seseorang untuk percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang telah dikumpulkan, yaitu percaya akan kapasitas dan kemampuan diri sendiri. Karakter ini dibentuk dari indikator:

- a) Memiliki percaya diri dalam menentukan keputusan
- b) Memiliki kapasitas dan kemampuan diri dalam menentukan keputusan

6. *Self Determination*

Adalah karakter seseorang untuk menyimpulkan secara obyektif atas bukti yang telah dikumpulkan. Karakteristik ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Tidak langsung menerima dan menyetujui pernyataan dari orang lain
- b) Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain

2.8 Hubungan Antar Variabel

2.8.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Sari dan Sudana (2013) kompetensi auditor adalah kemampuan auditor mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan

obyektif. Oleh karena itu, dalam melakukan audit khususnya dalam mendeteksi kecurangan harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Menurut Widiyastuti dan Pamudji (2009) untuk mengungkapkan kecurangan, auditor memerlukan kompetensi yang diperoleh dari keahliannya. Dengan kualitas kompetensi yang baik, auditor dapat mengasah kepekaanya dalam menganalisis laporan keuangan dan mampu mendeteksi berbagai macam cara rekayasa untuk melakukan kecurangan tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi sikap kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka kemampuannya untuk mendeteksi kecurangan juga semakin baik.

2.8.2 Pengaruh Pengalaman Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Pengalaman merupakan atribut terpenting bagi auditor. Auditor yang telah berpengalaman biasanya lebih dapat mendeteksi kekeliruan maupun kecurangan yang tidak lazim atau wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan, dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman (Kusuma, 2012). Pengalaman akan memberikan pembelajaran terhadap berbagai jenis kecurangan yang pernah ditemukan oleh auditor (Anggriawan, 2014).

Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mendeteksi kecurangan, memahami bagaimana kecurangan tersebut dilakukan dan mencari penyebab munculnya kecurangan tersebut. Semakin lama auditor bekerja dalam profesinya, maka semakin luas pengetahuan mengenai kecurangan (Fatimah, 2016). Oleh sebab itu,

semakin tinggi pengalaman yang dimiliki oleh auditor, maka semakin tinggi juga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2.8.3 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Saat melakukan audit laporan keuangan, tidaklah mudah bagi auditor dalam mempertahankan sikap independensinya. Menurut Adyani dkk (2014) auditor yang mempertahankan independensinya akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit akan dipandang tidak memihak atau tidak menyimpang.

Sikap independensi diperlukan auditor agar bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun sehingga auditor dapat mendeteksi adanya kecurangan dengan tepat dan setelah kecurangan tersebut dideteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangannya (Widiyastuti dan Pamudji, 2009).

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sikap independensi memberikan manfaat untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang diaudit. Jadi, semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki oleh auditor, maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2.8.4 Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Adyani dkk (2014) menyatakan bahwa skeptisisme profesional sangat penting guna memberikan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan untuk dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran

laporan keuangan. Haura (2016) mengatakan bahwa dengan memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi, auditor akan mengembangkan pencarian informasi tambahan bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan.

Dengan memiliki sikap skeptis yang tinggi, memungkinkan seorang auditor untuk mendeteksi kecurangan yang lebih baik (Anggriawan, 2014). Oleh sebab itu, semakin tinggi sikap skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor, maka semakin tinggi juga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2.9 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
1.	Sari dan Sudana (2013)	Variabel Dependen: Kualitas Proses Audit Variabel Independen: Kompetensi dan Independensi	Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali	Kompetensi dan Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Proses Audit.
2.	Widiyastuti dan Pamudji (2009)	Variabel Dependen: kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Variabel Independen: Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme	Auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta	Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
3.	Kusuma (2012)	Variabel Dependen: Pertimbangan Tingkat Materialitas Variabel Independen: Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor	Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta	Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan Tingkat Materialitas.
4.	Fatimah (2016)	Variabel Dependen: Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Variabel Independen: Pengalaman Auditor, Independensi, Tekanan Waktu, dan Skeptisisme Profesional	Auditor yang berkerja pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang	Pengalaman Auditor, Independensi, dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif signifikan, Sedangkan Tekanan Waktu memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
5.	Hartan (2016)	Variabel Dependen: Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan Variabel Independen: Skeptisisme profesional, independensi, dan kompetensi auditor	Auditor inspektorat yang berkerja di Daerah Istimewa Yogyakarta	Skeptisisme profesional, independensi, dan kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
6.	Adyani dkk (2014)	<p>Variabel Dependen: Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan dan kekeliruan Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Independen: Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Pengalaman Auditor.</p>	Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali	Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Pengalaman Auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan.
7.	Srikandi (2015)	<p>Variabel Dependen: Pendeteksian Kecurangan</p> <p>Variabel Independen: Kompetensi Auditor, dan Skeptisisme Auditor</p>	Akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BPK	Kompetensi dan Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendeteksian Kecurangan.
8.	Biksa dan Wiratmaja (2016)	<p>Variabel Dependen: Pendeteksian Kecurangan</p> <p>Variabel Independen: Pengalaman, Independensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor</p>	Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali	Pengalaman, Independensi, dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif signifikan terhadap Pendeteksian Kecurangan.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
9.	Anggriawan (2014)	Variabel Dependen: Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Variabel Independen: Pengalaman Kerja, Skeptisisme Profesional, dan Tekanan Waktu	Auditor yang bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengalaman Kerja, dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif signifikan, sedangkan Tekanan Waktu memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan
10.	Hayati (2019)	Variabel Dependen: Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Variabel Independen: Pengalaman Auditor, Skeptisisme Profesional, Tipe Kepribadian, dan <i>Red Flags</i>	Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Solo	Skeptisisme Profesional berpengaruh positif signifikan, sedangkan Pengalaman Auditor, Tipe Kepribadian, dan <i>Red Flags</i> tidak memiliki pengaruh terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Widiyastuti dan Pemudji (2009) dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mendeteksi kecurangan, auditor perlu didukung oleh sikap

kompetensi. Dengan memiliki sikap kompetensi yang diperoleh melalui pengetahuan, pendidikan dan keahlian khusus, auditor dapat menganalisis laporan keuangan dengan baik dan dapat mengetahui berbagai macam kecurangan atau trik-trik manipulasi yang dilakukan dalam melakukan tindakan kecurangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti dan Pamudji (2009) menyatakan bahwa sikap kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sari dan Sudana (2013) juga melakukan penelitian mengenai kompetensi dan hasilnya adalah bahwa sikap kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha1: kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

2.10.2 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Kusuma (2012) auditor yang memiliki berbagai macam pengalaman dalam mengaudit laporan keuangan akan memiliki pandangan yang lebih baik, kemampuan yang lebih baik dan tingkat analisis yang lebih tepat. Oleh sebab itu, memiliki tingkat pengalaman yang tinggi, menyebabkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan semakin baik pula, dikarenakan meningkatnya pandangan dan tanggapan mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pengalaman membantu auditor dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan pada

laporan keuangan, dikarenakan auditor telah melakukan berbagai macam tugas dan banyak memeriksa laporan keuangan yang menyebabkan auditor paham mengenai teknik-teknik melakukan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2012) menyatakan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2016) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{a2}: pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

2.10.3 Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Fatimah (2016) juga menyatakan bahwa independensi sangat penting bagi auditor untuk tetap mempertahankan kejujuran dan kebebasan dalam mempertimbangkan fakta yang ada, sehingga auditor dapat melakukan pendeteksian kecurangan tanpa danya tekanan dari pihak manapun. Penelitian yang dilakukan Hartan (2016) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Adyani dkk (2014) menyatakan bahwa independensi auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan

kekeliruan laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₃: independensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

2.10.4 Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung salah saji material (Standar Audit, 2013:200.9). Dengan sikap skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor, maka auditor tidak serta merta percaya mengenai penjelasan yang disampaikan oleh manajemen (Srikandi, 2015). Menurut Haura (2016) mengatakan bahwa dengan memiliki sikap skeptisisme yang tinggi, akan meningkatkan kemampuan mendeteksinya dengan cara mengembangkan pencarian informasi-informasi tambahan bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Srikandi (2015) mengatakan bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Biksa dan Wiratmaja (2016) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₄: skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan